



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
3-7 MARET 2020**

*

**

**

*

JAKARTA 2020



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
3-7 MARET 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020.
4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 26 Februari 2020.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian,

lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

D. SUSUNAN TIM

Nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Fraksi
1.	H. DEDI MULYADI	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI IV/ F.PG
2.	Ir. EFFENDI SIANIPAR	F.PDIP
3.	H. YADI SRIMULYADI	F.PDIP
4.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.	F.PDIP
5.	Ir. H. T. A. KHALID, M.M.	F.GERINDRA
6.	Ir. H. ENDRO HERMONO, M.B.A.	F.GERINDRA
7.	H. MUHTAROM, S.Sos.	F.PKB

No.	Nama	Fraksi
8.	EDWARD TANNUR, S.H.	F.PKB
9.	Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.	F.PD
10.	drh. SLAMET	F.PKS
11.	FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.	F.PAN
12.	K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.	F.PPP

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 3-7 Maret 2020 dan bertempat di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah.

F. GAMBARAN UMUM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang disingkat Babel adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau kecil yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang beribukotakan Pangkalpinang. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal dengan pantainya yang indah, kerukunan antaretnis dan dikenal dengan penghasilannya timahnya.

Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka dan Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, tetapi pada tahun 2000 menjadi provinsi sendiri. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan menambahkan empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah selama tujuh bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama lima bulan terus menerus. Tahun 2007 bulan kering terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober dengan hari hujan 11-15 hari per bulan. Untuk bulan basah hari hujan 16-27 hari per bulan, terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli dan bulan November sampai dengan bulan Desember.



Peta Provinsi Bangka Belitung

Kedadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata di bawah 5, akan tetapi memiliki kandungan aluminium yang sangat tinggi. Di dalamnya mengandung banyak mineral biji timah dan bahan galian berupa pasir, pasir kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dan lain-lain.

Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Kepulauan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Konsentrasi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Adapun konsentrasi pembangunan menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bangka dengan Ibukota Sungailiat berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, pertambangan, dan perkebunan.
2. Kabupaten Belitung dengan Ibukota Tanjungpandan berkonsentrasi pada wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, industri pengolahan, dan perikanan laut.
3. Kabupaten Bangka Barat dengan Ibukota Muntok, berkonsentrasi pada pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan.
4. Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibukota Koba, berkonsentrasi pada perkebunan dan pertambangan.
5. Kabupaten Bangka Selatan dengan Ibukota Toboali, berkonsentrasi pada pengembangan di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan laut, dan perdagangan.
6. Kabupaten Belitung Timur dengan Ibukota Manggar, merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian, pariwisata, dan jasa.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pertemuan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (SKIPM) mempunyai 3 wilayah kerja yakni di Pangkalpinang, Muntok, dan Tanjung Pandan, memiliki anggaran sejak tahun 2018 sekitar Rp8 miliar, kemudian turun di tahun 2019 menjadi Rp7 miliar dan di tahun 2020 kembali naik sekitar Rp9 miliar, dengan anggaran tersebut SKIPM memenuhi kebutuhan lingkup seperti penerapan standar ISO, baik yang ISO IEC1720:2012 Standar Inpeksi, ISO IEC17025:2017 Standar Uji dan Kalibrasi Laboratorium, maupun ISO IEC9001:2005 Sistem Manajemen Mutu.
- b. Namun demikian SKIPM juga memiliki kendala dan masalah seperti:
 - 1) Masih belum tersedianya fasilitas ekspor impor langsung yang memadai dari Bangka Belitung, karena peningkatan luar biasa budi

- daya udang dan kerapu di Bangka Belitung dapat menimbulkan ancaman penyakit baru;
- 2) Kompetensi dan sebaran SDM yang belum ideal;
 - 3) Peralatan laboratorium pendukung lalu lintas yang belum tersedia: *real-time Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan *Hight Performance Liquid Chromatography (HPLC)*;
 - 4) Kantor dan laboratorium uji di Belitung yang belum tersedia serta anggaran bahan uji laboratorium yang sangat terbatas;
 - 5) Status eselonering UPT Pangkalpinang dengan wilayah kerja satu provinsi, masih eselon IV sangat perlu peningkatan untuk menjadi eselon II b; serta
 - 6) Kendaraan operasional roda 4 yang terbatas, terutama di Belitung.
- c. Tujuan kunjungan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke SKIPM adalah untuk:
- 1) melihat/meninjau secara langsung kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh seluruh staf yang ada di SKIPM - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - 3) Mendengarkan secara langsung masukan/aspirasi dari *stakeholder* atau SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Dari peninjauan di SKIPM, Komisi IV DPR RI mendapatkan masukan/aspirasi yakni:
- 1) Perlunya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, baik laboratorium, kendaraan, maupun fasilitas 8P;
 - 2) Adanya masukan dari Dinas Lingkungan Hidup, dimana perlu didesak pengesahan dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3) Adanya masukan dari pelaku usaha agar ijin penggunaan lahan bekas tambang timah dapat dipakai peruntukannya untuk tambak atau budi daya ikan; dan

- 4) Tantangan ke depan senjata biologis yang dapat merusak hasil sumber daya ikan akan terjadi, untuk itu dibutuhkan dukungan politis dari DPR RI adanya regulasi/undang-undang yang memperkuat peran karantina, baik hewan, ikan, maupun tumbuhan agar dapat memproteksi Indonesia.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mendukung penguatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).
- b. Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh perangkat SDM BKIPM lebih waspada akan serangan penyakit, baik pada ikan segar maupun turunan dengan menerapkan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian atas usulan penggunaan lahan bekas tambang timah yang ditinggalkan menjadi areal tambak budi daya ikan.
- d. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kembali melakukan kajian dan proses tindak lanjut atas permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kunjungan dan Pertemuan di Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Areal Bekas Tambang di Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Lokasi kunjungan merupakan areal kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di lahan bekas tambang di Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, yang dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Baturusa Cerucuk bersama-sama dengan Korem 045/Garuda Jaya sebagai salah satu program/kegiatan di Direktorat

Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Kegiatan RHL yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut adalah penanaman seluas 25 hektar dengan jarak tanam 2 m x 3 m dengan tanaman hutan jenis mete, cemara laut, dan kayu putih yang merupakan tanaman pionir dan diketahui memiliki kemampuan beradaptasi pada lahan kritis yang tercemar.
- c. Pada areal RHL seluas 25 hektar dan memiliki persen tumbuh rata-rata sebesar 97%, BPDAS-HL Baturusa Cerucuk melakukan uji coba penanaman tanaman produktif dari jenis sirsak dan jeruk sunkist yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa buah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi RHL.
- d. Kendala utama yang dihadapi oleh BPDAS-HL Baturusa Cerucuk dalam melaksanakan kegiatan RHL di lahan bekas tambang adalah sangat minimnya standar biaya pembuatan tanaman (mulai dari produksi bibit, penyiapan lahan, penanaman, sampai dengan pemeliharaan tanaman), dimana hampir seluruhnya memiliki karakteristik lahan kritis yang tercemar.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh BPDAS-HL Baturusa Cerucuk serta BPDAS-HL di seluruh Indonesia dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di areal bekas tambang, dimana hampir seluruhnya memiliki karakteristik lahan kritis yang tercemar.
- b. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran kegiatan RHL di areal bekas tambang berupa peningkatan standar biaya pembuatan tanaman, mulai dari produksi bibit tanaman produktif, penyiapan lahan mekanis dan semi mekanis, penanaman, sampai dengan pemeliharaan tanaman.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan upaya peningkatan keberhasilan program RHL, terutama di areal yang memiliki karakteristik

lahan kritis, dengan terus melakukan peningkatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

3. Peninjauan dan Pertemuan di Kampung Integrasi Sawit - Sapi di Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Kampung Integrasi Sawit - Sapi Sungai Selan merupakan program yang dilaksanakan melalui kerja sama Pusat Penelitian Pengembangan Ternak Bangka Belitung, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung, dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Sistem Integrasi Sapi-Sawit yang lebih dikenal dengan SISKKA (Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit) merupakan salah satu Program Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan populasi sapi di dalam negeri. Peningkatan pendapatan, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi mengakibatkan permintaan daging sapi yang terus meningkat setiap tahun. Sejak tahun 2015, secara intensif Balitbangtan telah melakukan pengawalan dan pendampingan kegiatan SISKKA pada Kelompok Tani "Tunas Baru" di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Tujuan dari pendampingan dan pengawalan ini antara lain adalah untuk mengakselerasi peningkatan populasi sapi potong yang kebutuhan dagingnya masih dipasok dari provinsi lain dan meningkatkan pendapatan petani melalui budi daya sapi potong yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan petani, namun saat ini belum tersedia lahan khusus bagi pengembangan usaha peternakan. Ini menjadi tantangan, sehingga SISKKA merupakan suatu program terobosan melalui pemanfaatan lahan di bawah perkebunan sawit beserta produk samping industri kelapa sawit sebagai pakan sapi.
- d. Tujuan kunjungan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Lokasi Program SISKKA Sungai Selan adalah untuk:
 - 1) melihat/meninjau secara langsung Program SISKKA di Provinsi Bangka Belitung;

- 2) mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di sekitar Program SISKAs - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta
 - 3) mendengarkan secara langsung masukan/aspirasi dari *stakeholder* atau SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh kelompok tani di lokasi Program SISKAs Sungai Selan adalah sebagai berikut:
- 1) perlunya dukungan anggaran untuk memenuhi Program SISKAs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dapat ditingkatkan;
 - 2) adanya masukan dari masyarakat agar jumlah kelompok diperbanyak;
 - 3) adanya permintaan taman penelitian pertanian (*Agricultural Technology Research Park*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta
 - 4) adanya tantangan ke depan yakni hasil produk dari SISKAs dapat diterima oleh masyarakat, baik produk susu dan daging sapi maupun produk pupuk organik dan hasil ikutan lainnya.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran Kementerian Pertanian, khususnya untuk Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk dapat menduplikasi Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi program unggulan yang dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia serta pengembangan produk yang dihasilkan melalui Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit, dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan para petani.

4. Peninjauan Gudang Bulog Selindung di Kota Pangkalpinang

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Realisasi dan Rencana Operasional Perum Bulog Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

No	Kanwil / Kacab	(ton)					
		2019			2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	DIVRE SUMSEL	32.095	37.366	116%	23.552	1.957	8%
2	KANLOG MURA	2.399	1.572	66%	3.446	240	7%
3	SUBDIVRE LAHAT	5.650	1.546	27%	5.211	271	5%
4	SUBDIVRE BANGKA	241	327	136%	1.072	-	0%
5	KANLOG BELITUNG	32	0	0%	137	-	0%
6	SUBDIVRE OKU	30.157	10.878	36%	26.580	592	2%
JUMLAH		70.574	51.690	73%	60.000	3.059	5%

Realisasi Pengadaan Bulog di Wilayah Provinsi Sumsel dan Babel

NO	KANWIL	KOMODITI	PENJUALAN BPNT 01 JAN SD 20 FEB 2020				TOTAL PENJUALAN BPNT	
			Melalui RPK, E-Warong dan Agen		Melalui Distributor		Kg	Rp
			Kg	Rp	Kg	Rp		
1	SUMSEL & BABEL	BERAS	2.199.782	22.362.677.000	-	-	2.199.782	22.362.677.000
		TELUR	-	-	-	-	-	-

Sumber data : aplikasi penjualan Langsung dan SIL

Penyaluran BPNT Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Sumsel dan Babel

- b. Tujuan kunjungan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Selindung di Kota Pangkalpinang adalah untuk:
- 1) melihat/meninjau secara langsung ketersediaan beras dan bahan pokok lainnya yang ada di Gudang Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta
 - 2) mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Perum Bulog di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Beberapa aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan ke Gudang Bulog Selindung adalah sebagai berikut:
- 1) perlunya dukungan politik untuk penguatan tugas dan fungsi Perum Bulog, yaitu sebagai *buffer*/penyangga kebutuhan pangan secara nasional;
 - 2) adanya masukan terkait pemenuhan sumber daya manusia dan kualitas sarana prasarana di Gudang Bulog terutama di daerah-daerah; serta

- 3) perlu dukungan politik, mengingat adanya tantangan ke depan untuk membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk menjamin ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog terkait penguatan tugas dan fungsi Perum Bulog melalui pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk terus meningkatkan kualitas produk beras serta produk pangan lainnya dalam rangka memenuhi kualitas standar konsumsi pangan masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Bulog secara bertahap dapat meningkatkan kualitas gudang milik Perum Bulog di seluruh Indonesia dan secara paralel juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

5. Peninjauan Gudang Pupuk PT Petrokima Gresik di Kota Pangkalpinang

Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

- a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam wilayah tugas PT Petrokima Gresik, dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk seperti ZA, SP-36, 3 NPK, dan PETROGANIK, dengan total realiasi alokasi tahun 2019 mencapai 57.931 ton, dimana sampai dengan bulan Februari 2020 realisasi penyerapan sudah mencapai 8.071 ton dan diharapkan PT Petrokimia Gresik dapat memenuhi seluruh kebutuhan pupuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2020.
- b. Tujuan kunjungan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke gudang pupuk di Kota Pangkalpinang adalah untuk:
 - 1) melihat/meninjau secara langsung ketersediaan pupuk untuk tercapainya program swasembada pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta

- 2) mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi kendala serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh PT Petrokimia Gresik dalam pelaksanaan penyaluran pupuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Beberapa aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan ke Gudang Pupuk PT Petrokima Gresik adalah sebagai berikut:
- 1) perlunya dukungan politik agar penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan lancar dan tidak mengalami kendala; serta
 - 2) perlu adanya dukungan terkait standarisasi kualitas pupuk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan produk pupuk non BUMN lainnya.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) dan khususnya PT Petrokimia Gresik untuk menjamin ketersediaan pupuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka tercapainya swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Komisi IV DPR RI akan mendukung seluruh kegiatan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar proses penyediaan pupuk di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan secara optimal, dalam rangka tercapainya swasembada pangan.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendukung penguatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).
2. Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh perangkat SDM BKIPM agar lebih waspada akan serangan penyakit, baik pada ikan segar maupun turunan dengan menerapkan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian atas usulan penggunaan lahan bekas

tambang timah yang ditinggalkan untuk menjadi areal tambak budi daya ikan.

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kembali melakukan kajian dan proses tindak lanjut atas permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di areal bekas tambang berupa peningkatan standar biaya pembuatan tanaman, mulai dari produksi bibit tanaman produktif, penyiapan lahan mekanis dan semi mekanis, penanaman, sampai dengan pemeliharaan tanaman.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan upaya peningkatan keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terutama di areal yang memiliki karakteristik lahan kritis, dengan terus melakukan peningkatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
7. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran Kementerian Pertanian, khususnya untuk Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk dapat menduplikasi Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi program unggulan yang dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
9. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya pembinaan sumber daya manusia serta pengembangan produk yang dihasilkan melalui Program Sistem Integrasi Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit, dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan para petani.
10. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk menjamin ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog terkait penguatan tugas dan fungsi Perum Bulog melalui pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

12. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk terus meningkatkan kualitas produk beras serta produk pangan lainnya dalam rangka memenuhi kualitas standar konsumsi pangan masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Bulog secara bertahap dapat meningkatkan kualitas gudang milik Perum Bulog di seluruh Indonesia, dan secara paralel juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimilikinya.
13. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) dan khususnya PT Petrokimia Gresik untuk menjamin ketersediaan pupuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka tercapainya swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Komisi IV DPR RI akan mendukung seluruh kegiatan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar proses penyediaan pupuk di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan secara optimal, dalam rangka tercapainya swasembada pangan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2020

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi

A-294

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28027/t/SKIPM+Babel+Harus+Penuhi+Kelengkapan+Laboratorium+dan+Tenaga+Analisis>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28032/t/Anggota+DPR+Imbau+KLHK+Berinovasi+Kelola+Kawasan+RHL>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28034/t/Kementan+Perlu+Siapkan+Sarpras+untuk+Program+Bagi+Benih+Sapi>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28035/t/Pendidikan+Karakter+Penting+bagi+Anak+Petani>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28037/t/Bulog+Harus+Antisipasi+Kebutuhan+Pangan+Nasional+Akibat+Virus+Corona>

<http://distan.babelprov.go.id/content/kadis-pertanian-babel-dampingi-wagub-terima-kunker-komisi-iv-dpr-ri>

<https://www.antaraneews.com/berita/1332674/komisi-iv-dpr-minta-pemprov-babel-tentukan-sektor-unggulan>

<https://babel.antaraneews.com/berita/133518/komisi-iv-dpr-tinjau-kemampuan-stasiun-karantina-ikan-babel>

http://djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/487/DAMPINGI-KUNKER-KOMISI-IV-DPR-RI-KE-BABEL-KKP-SERAHKAN-BANTUAN-325-RIBU-BENIH-DAN-4-RIBU-CALON-INDUK-IKAN/?category_id=10

<https://pilarpertanian.com/kunjungi-babel-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-peran-balitbangtan>

<https://www.liputan.co.id/2020/03/dpr-ri-minta-lengkapi-alat-dan-analisis-stasiun-karantina-ikan-babel/>